

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Kekayaan Mencapai Rp 23,8 Miliar

▶ Kasatpol PP Bantah Berasal dari Pungli

Gambir, Warta Kota

Kepala Satpol (Kasatpol) PP DKI Jakarta, Arifin akhirnya angkat suara setelah dirinya ramai dibicarakan lantaran harta kekayaan yang mencapai Rp 23,8 miliar.

Arifin mengaku terdapat kesalahan teknis pada saat pengisian data jumlah harta kekayaan.

"Ada kesalahan dalam pengisian data. Nanti akan kami perbaiki," ujar Arifin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Ia pun menyadari dirinya salah karena telah keliru mengisi nominal. Arifin mengatakan bahwa ia kelebihan dalam menuliskan harta kekayaannya.

"Iya kami yang mengisi data, kelebihan ngisinya," ucap Arifin sambil tertawa kecil.

Arifin pun mengelak bahwa harta kekayaannya terdapat hasil dari pungutan liar (pungli) yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan.

Saat ditanya nominal yang benar dan pasti, Arifin mengaku masih belum mengetahui.

"Masih belum tahu, ini sedang dihitung. Yang jelas ada kesalahan," kata Arifin.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta diminta menunjuk Inspektorat DKI Jakarta untuk mendalami Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tajir. Salah satunya adalah Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin yang memiliki harta kekayaan hingga Rp 23,8 miliar.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan mengatakan bahwa angka tersebut menimbulkan banyak pertanyaan.

Apalagi harta kekayaannya melampaui mantan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali sebesar Rp 4,6 miliar.

Padaحال, kata dia, tambahan penghasilan

pegawai (TPP) Marullah lebih besar dibanding Arifin.

Jika mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 19 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), posisi Sekda mendapatkan TPP sebesar Rp 120.710.000.

Kemudian Asisten Sekda Rp 63,9 juta, Kepala Dinas kisaran Rp 55 - Rp 60 juta. Sedangkan untuk gaji pokok para kepala dinas atau pejabat eselon II per bulan sebesar Rp 3 - Rp 5,9 juta.

"Mengukur dari aturan ini, Arifin baru tahun 2019 diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan) saat itu menjadi Kasatpol PP, kok harta kekayaannya bisa sedemikian besarnya," ujar Tigor berdasarkan keterangannya, pada Selasa (20/12/2022).

Tak Yakin

Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meyakini, harta kekayaan Arifin tidak sampai Rp 24 miliar.

Hal ini berkaca pada gaji pokok dan tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diperoleh Arifin saat mengemban amanah menjadi Satpol PP.

"Apakah mungkin pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta memiliki harta sebesar itu? Saya pastikan tidak, kalau hanya dari penghasilan PNS gitu," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pada Selasa (20/12/2022).

Gembong mengatakan, harta kekayaan Arifin bisa saja diperoleh dari warisan orang tua atau dia memiliki usaha lain yang tidak diketahui publik. Meski begitu, aparatur sipil negara (ASN) tetap menjunjung semboyan untuk mengabdikan pada negara dan masyarakat.

(m36/faf)